



LAPORAN

RAPAT KONSULTASI ADMINISTRASI KEUANGAN
TAHUN 1993



BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I

KATA PENGANTAR

Buku laporan Rapat Komite I Administrasi Keuangan Tahun 1993 ini akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang dan pendukung dalam penyusunan anggaran rutin tahun 1994/1995, sehingga akan dicapai keberagaman dalam menentukan besar kecilnya plafon anggaran rutin untuk semua satuan kerja di lingkungan Setjen Depkes (Kanwil, Kandepkes dan Gudang Farmasi).

Buku laporan ini memuat beberapa data serta usulan kebutuhan yang diajukan semua satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, Kantor Departemen Kesehatan dan Gudang Farmasi yang diperoleh langsung dari pembahasan desk.

Penyajian Buku Laporan Rapat Konsultasi Administrasi Keuangan tahun 1993 ini adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Maksud dan tujuan
3. Penyelenggaraan rapat administrasi keuangan
4. Hasil - hasil rapat Konsultasi yang memuat beberapa permasalahan umum dan khusus
5. Kesimpulan/Penutup.

Demikianlah buku laporan Rapat Konsultasi ini semoga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan pembahasan anggaran rutin tahun 1994/1995.



DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
II. MAKSUD DAN TUJUAN	1
III. DASAR	2
IV. PESERTA	2
V. PERSIAPAN	4
VI. PENYELenggaraAN KONSULTASI	3-5
VII. HASIL -HASIL SIDANG PLENO TAHAP II	5
A. PERMASALAHAN ANGGARAN BUDIN	5-13
B. PERMASALAHAN ANGGARAN PEMBANGUNAN	13-15
C. PERMASALAHAN PERBENDAHARAAN	16-18
D. PERMASALAHAN PERHITUNGAN ANGGARAN	18
VIII. KESIMPULAN/PENUTUP	18-19

RAPAT KONSULTASI ADMINISTRASI KEUANGAN
Tanggal 2 Agustus s.d. 7 Agustus 1993
di Ujung Pandang

I. Pendahuluan:

Dalam tahun 1993/1994 anggaran rutin non belanja pegawai Kantor Wilayah, Kantor Departemen Kesehatan dan Gudang farmasi adalah sebesar Rp 6.446.626.000,00 atau 40% dari Daftar Usulan Kegiatan (DUK) sebesar Rp 16.130.063.000,00. Anggaran rutin tersebut apabila dibandingkan dengan DUK 1992/1993 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.196.017.000,00 atau 23% yaitu dari Rp 5.250.609.000,00 menjadi Rp 6.446.626.000,00. Kenaikan tersebut telah terserap oleh satuan kerja baru yaitu 63 Gudang farmasi dan 5 Kantor Departemen Kesehatan, kegiatan pembinaan dan penilaian jabatan fungsional serta kegiatan penelitian khusus (litsus).

Daftar usulan kegiatan yang diterima oleh Biro Keuangan cara perhitungannya maupun pengalokasiannya belum sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan nomor : S-1143/ HK.03/1992 tanggal 10 September 1992 perihal Persiapan Penyusunan Anggaran Belanja Rutin 1993/1994 misalnya usulan mata anggaran 5210 ditetapkan berdasarkan perkiraan, sedangkan perhitungan yang benar adalah jumlah pegawai murni x indeks biaya.

Daftar Usulan Kegiatan (DUK) 1993/1994 Kanwil, Kandepkes dan Gudang Farmasi yang diterima oleh Biro Keuangan baru 60% sehingga mengalami kesulitan dalam penyusunan dan penentuan prioritas kebutuhan. Untuk penyusunan anggaran diperlukan informasi atau data pendukung berupa jumlah pegawai murni, diperbantukan dan dipekerjakan, volume kegiatan, daftar inventaris, data telepon/ listrik/air, luas gedung, halaman, taman, pagar, jalan, saluran air, rincian biaya rehabilitasi gedung yang diketahui oleh PU setempat, jumlah kendaraan yang dimiliki dan jarak antara propinsi ke kabupaten/kecamatan serta jenis angkutan yang digunakan.

Dengan semakin meningkatnya anggaran yang dialokasikan maka semakin perlu dilakukan upaya untuk peningkatan tertib administrasi dibidang keuangan, agar pengelolaan dana makin efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan perencanaan program serta sumber dana yang terpadu, serasi, efisien dan efektif. Dalam pelaksanaannya tidaklah mudah, sehingga perlu peningkatan pembinaan kemampuan pengelolaan administrasi dan manajemen ditingkat Kantor Wilayah.

II. Maksud dan Tujuan :

Umum :

1. Pemantapan penyusunan anggaran rutin tahun 1994/1995.
2. Peningkatan dan pembinaan administrasi keuangan tingkat Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.
3. Peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi dan manajemen Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.

Khusus :

1. Untuk memperoleh keberagaman, keserasian dan kemandapan mengenai penyusunan anggaran rutin.
2. Untuk memperoleh masukan mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam penyusunan, pengalokasian maupun pengelompokan anggaran.
3. Untuk menetapkan prioritas utama dalam penyusunan anggaran.
4. Tata cara pengisian DUK dan pembebanan biaya.
5. Untuk menghindari duplikasi biaya terhadap sesuatu kegiatan.
6. Untuk mendapatkan data guna penyusunan anggaran.
7. Untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan anggaran.
8. Untuk menjelaskan arah dan kebijaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang tahap kedua (PJPT II) pada umumnya dan perencanaan kesehatan tahun 94/95 pada khususnya.
9. Untuk menjelaskan masalah kepegawaian, khususnya jabatan fungsional.
10. Untuk menjelaskan penataan persuratan, arsip dan penggajian.
11. Untuk menjelaskan inventarisasi Kekayaan milik negara (IKM).
12. Menjelaskan berbagai hal penting menyangkut hukum dan keuangan.
13. Menjelaskan peranan tata usaha didalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring untuk program-program pembangunan dan rutin.
14. Menjelaskan penyelesaian tindak lanjut LPP.

III. Dasar :

1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan no. 558/Menkes/SK/IV/1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
2. Surat Menteri Keuangan tanggal 22 Desember 1992 nomor S-1562/MK.04/12992 perihal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara rutin tahun 1993/1994.
3. Daftar Isian Kegiatan (DIK) 1993/1994 Setjen no. 001/24/93.
4. Buku Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Rutin tahun 1993/1994.
5. Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Rutin thn 93/94.

IV. Peserta : 171 Orang

A. Pusat 44 orang

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Biro Perencanaan | 3 orang |
| 2. Direktorat Jenderal Anggaran | 1 orang |
| 3. Bappenas | 1 orang |
| 4. Biro Kepegawaian | 2 orang |
| 5. Sekretaris Jenderal | 1 orang |
| 6. Biro Perlengkapan | 2 orang |
| 7. Biro Umum | 4 orang |
| 8. Biro Humas | 1 orang |
| 9. Biro Organisasi | 2 orang |
| 10. Biro Keuangan : 27 orang | |
| a. Kepala Biro Keuangan | 1 orang |
| b. Kepala Bagian | 5 orang |
| c. Kepala Sub. Bagian | 11 orang |
| d. Staf | 10 orang |

B. Daerah

Kantor Wilayah 27 Propinsi 54 orang

C. UPT dari Propinsi Sulawesi Selatan 64 Orang

D. Panitia Daerah 9 orang

V. Pembiayaan:

- A. Biaya rapat konsultasi administrasi: Berbagi-bagi peserta pusat tersedia dalam DIK Sekretariat Jendral Departemen Kesehatan nomor 001/24/93 mata anggaran 5250 sebesar Rp 33.500.000,00 (Tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- B. Biaya penyelenggaraan tersedia dalam DIK nomor 019/24/93 mata anggaran 5250 sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- C. Peserta Kantor Wilayah biayanya tersedia dalam mata anggaran 5410 DIK masing-masing.

VI. Penyelenggaraan konsultasi:

A. Persiapan :

1. Mengadakan rapat pendahuluan dalam rangka persiapan pelaksanaan rapat konsultasi.
2. Membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Sulawesi Selatan tentang rencana rapat konsultasi administrasi keuangan.
3. Membuat jadwal kerja dalam rangka persiapan Konsultasi Administrasi keuangan kepada masing-masing pelugas.
4. Peninjauan tempat pelaksanaan Konsultasi Keuangan di Ujung Pandang.
5. Membuat jawaban surat Kepala Depkes Provinsi Sulawesi Selatan perihal penentuan tanggal dan tempat pelaksanaan Rapat Konsultasi Administrasi Keuangan.
6. Membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Wilayah seluruh provinsi tentang penyelenggaraan rapat konsultasi administrasi keuangan yang diencanakan pada tanggal 2 s.d. 7 Agustus 1993.
7. Membuat surat dispensasi penggunaan sekaligus biaya penyelenggaraan rapat konsultasi administrasi keuangan kepada Kanwil VI Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan sebesar Rp 33.500.000,00.
8. Mengajukan Permintaan SPPD dan persekot ke Biro Umum.
9. Mengadakan rapat para Kepala Biro dalam rangka persiapan rapat konsultasi administrasi keuangan.
10. Menghubungi para penyaji agar menyiapkan makalah yang akan disajikan.

B. Peninjauan ke Ujung Pandang :

Tujuan peninjauan awal ke Ujung Pandang adalah untuk melakukan pembicaraan dengan Kantor Wilayah dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Konsultasi Administrasi Keuangan, serta meninjau tempat pelaksanaan. Biaya perjalanan ini menggunakan alokasi mata 5410 konsultasi ke daerah dalam rangka penyusunan anggaran rutin mengingat dana untuk penyelenggaraan Rapat Konsultasi Administrasi Keuangan sangat terbatas.

C. Pelaksanaan :

1. Tempat : Makasar City Hotel Jl. Chairil Anwar. no. 33
ujung Pandang
2. Tanggal : 2 s/d 7 Agustus 1995

D. Pembahasan:

Pembahasan konsultasi akan dilaksanakan melalui sidang pleno dan desk.

1. Sidang Pleno I.

- a. Laporan Kepala Biro Keuangan.
Priyono Ashari, SE, MBA.
- b. Sambutan Kepala Kantor Wilayah DepKes Propinsi Sulsel
-Dr. H. Udin Muhammad Muslaini
- c. Pembukaan Rapat Konsultasi Administrasi Keuangan
- Bapak Sekjen Dr. M. Hidayat Hardjoprawito
- d. Perencanaan Kesehatan
-Fazli Djalal PHD (Bappenas)
- e. Administrasi Keuangan
-Priyono Ashari SE, MBA didampingi para Kabag di lingkungan Biro Keuangan
- f. Perencanaan Pembangunan Kesehatan
-Dr. Dedy Ruswandi, MPH (Mewakili Karo Perencanaan)
- g. Penyusunan Anggaran Rutin 1994/1995
-Drs Maurits S.M. Sirait (Kasubdit PAR DJA Dep. Keuangan)
- h. Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN)
-Drs. Bambang Lesmono (Karo Perlengkapan)
- i. Hukum dan Kehumasan
-Emma Suratman SH (Karo Hukmas)
- j. Organisasi dan Tata laksana
-Dr. Imbalu S. Pohan (Karo Organisasi)
- k. Kearsipan, Tata Persuratan dan Penggajian/Pembangunan Prasarana Fisik
-Dr. Soekarjono, M.P.H (Karo Umum)
- l. Beberapa masalah kepegawaian yang berimplikasi terhadap Administrasi Keuangan.
-Dr. Muhaso, SKM. (Karo Kepegawaian)
- m. Penyelenggaraan management anggaran pada Kanwil Jambi.
-Drs Himsar Siregar SKM (Kabag TU Kanwil Jambi).
- n. Pelaksanaan anggaran rutin Kanwil Kalimantan Selatan.
-Zubair BSc (Kabag TU Kanwil Kalimantan Selatan).

2. Pembahasan dengan Desk.

Desk I : (D. Sagala, SE.)

- a. Kalimantan Barat
- b. Sulawesi Tengah
- c. Nusa Tenggara Timur
- d. Aceh
- e. Sumatera Selatan
- f. Jawa Timur
- g. Maluku

- Desk II : (Sujoto)
- Bengkulu
 - Irian Jaya
 - Kalimantan Selatan
 - Sulawesi Tenggara
 - Sumatera Barat
 - DI Yogyakarta
 - Nusa Tenggara Barat

- Desk III : (Sutirman)
- Bali
 - Sulawesi Selatan
 - Kalimantan Timur
 - Jawa Barat
 - Timor Timur
 - DKI
 - Sumatera Utara

- Desk IV : (Dra. Sri Surjati)
- Kalimantan Tengah
 - Riau
 - Sulawesi Utara
 - Lampung
 - Jawa Tengah
 - Jambi

- Desk V : (Drs. Saragih) diikuti oleh seluruh propinsi.
Desk VI : (Drs. Suparman) diikuti oleh seluruh propinsi.
Desk VII : (Dra. Raharni) diikuti oleh seluruh propinsi.

3. Sidang pleno tahap II dilaksanakan untuk menyampaikan rangkuman hasil pembahasan desk guna memperoleh tanggapan dan penyempurnaan yang disampaikan oleh penanggung jawab desk.

- Desk I : D. Segala, S.E.
Desk II : Sujoto
Desk III : Sutirman
Desk IV : Dra. Sri Surjati
Desk V : Drs. Suparman
Desk VI : Drs. Saragih
Desk VII : Dra. Raharni

VII. Sidang pleno II

Sidang pleno ini dilaksanakan dalam rangka penyajian hasil desk guna mendapatkan tanggapan dan penyempurnaannya. Hasil desk tersebut dijelaskan dalam sidang pleno menjadi 4 kelompok yaitu :

A. Permasalahan anggaran rutin.

Permasalahan anggaran rutin yang dihadapi Kanwil, Kandeptes dan Gudang Farmasi dikelompokkan menjadi 2 kelompok.

1. Permasalahan umum

Permasalahan umum adalah masalah-masalah yang utamanya dihadapi oleh seluruh Kanwil, Kandeptes dan Gudang Logistik dalam pelaksanaan anggaran rutin yaitu :

a. Mata Anggaran 5210 (keperluan sehari-hari perkantoran)

Dana pada mata anggaran ini masih kurang apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya, hal ini disebabkan belum menampung seluruhnya biaya DTK untuk kegiatan litsus, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional, sewa gedung kantor, alokasi dana dalam DTK belum sesuai dengan indeks yang diusulkan dan bertambahnya volume kegiatan antara lain kehumasan, kearsipan, dan Or PTT.

b. Mata anggaran 5220 (inventaris kantor)

Dana pada mata anggaran ini masih kurang apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya hal ini disebabkan, pengadaan inventaris tahun tujuh puluhan dan sudah rusak, sehingga perlu diganti serta membutuhkan biaya perbaikan yang cukup besar, pengisian inventaris kantor untuk gedung baru dan aula, dan adanya satuan Kerja baru.

c. Mata anggaran 5230 (langganan daya dan jasa)

Dana pada mata anggaran ini masih mengalami kekurangan karena bertambahnya peralatan yang menggunakan listrik, bertambahnya alat komunikasi, sedangkan dananya tidak naik, karena kenaikan mata anggaran 5230 di lumpung di pusat.

d. Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang)

Dana pada mata anggaran ini masih kurang memadai, hal ini disebabkan belum seluruhnya tersedia dananya untuk tim penilai jabatan fungsional, tim penelitian khusus (litsus), kehumasan, kearsipan dan pengadaan komputer dirasakan sangat mendesak untuk Bagian Kepegawaian mengingat besarnya kegiatan yang harus dilaksanakan, seperti pembuatan SK pengangkatan, penugasan, data-data Or PTT, Bidang Inpres dsb, pembelian pakaian dinas untuk seluruh pegawai sesuai dengan instruksi gubernur dan biaya pustakawan.

e. Mata anggaran 5310 (pemeliharaan gedung kantor)

Dana pada mata anggaran ini kurang memadai apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan belum sejujurnya luas gedung kantor sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besarnya alokasi dana dan adanya penambahan/pengembangan gedung kantor.

f. Mata anggaran 5330 (pemeliharaan kendaraan bermotor)

Dana pada mata anggaran ini kurang memadai apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan belum seluruh kendaraan roda 3 maupun roda 2 yang ada disediakan biaya pemeliharaannya dalam DIK. Kendaraan yang ada umumnya sudah tua dan memerlukan biaya perbaikan/ rehabilitasi yang cukup besar.

g. Mata anggaran 5350 (pemeliharaan lain-lain)

Dana pada mata anggaran ini membutuhkan biaya rehab gedung kantor yang usianya sudah cukup tua, pembuatan pagar, pengerasan jalan, pemeliharaan taman, pengurugan, saluran air, instalasi air, listrik, telepon, persiatan serta penambahan daya dan jasa. Khusus Kandep Kesehatan alokasi dana mata anggaran ini belum tertampung dalam DIK.

h. Mata anggaran 5410 (perjalanan dinas dinas)

Dana pada mata anggaran ini belum memadai apabila dibandingkan dengan kegiatan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan bertambahnya frekwensi panggilan dari pusat untuk pejabat daerah yang tidak dapat ditanggungkan pelaksanaannya, kenaikan tarif angkutan sehingga mempengaruhi anggaran yang tersedia, biaya bimbingan/supervisi yang selama ini belum semua Kab/Kodya dan Kecamatan terjangkau dan kesulitan perjalanan untuk beberapa Dati II dan Kecamatan yang sarana transportasi harus menggunakan kapal laut atau pesawat udara untuk daerah yang sangat terpencil.

2. Permasalahan khusus

Yang dimaksud dengan permasalahan khusus adalah masalah-masalah yang dihadapi satu propinsi berbeda dengan propinsi lain hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

(1) Propinsi DKI Jakarta

- a. Mata anggaran 5210 (keperluan sehari-hari perkantoran)
Diperlukan biaya untuk sewa gedung lima buah Kandepkes.
- b. Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang)
Diperlukan biaya penyelesaian masalah keuangan, kepegawaian, penyelenggaraan sumpah pegawai/pejabat, kehumasan dan biaya dalam rangka perayaan hari-hari besar. Pengadaan 6 buah AC untuk ruang rapat dan perlengkapan.

(2) Propinsi Jawa Barat

Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)
Untuk Kanwil Depkes dibutuhkan biaya rehab gedung Bidang Farmasi dan makanan depan ruang kepegawaian.

(3) Propinsi Jawa tengah

- a. Mata anggaran 5220 (inventaris kantor)
Untuk Kanwil Depkes dibutuhkan kursi rapat 200 buah dan 12 meja kursi setel.
- b. Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang)
Diperlukan biaya penghapusan obat-obatan yang telah rusak (kadaluarsa), 2 buah komputer untuk Bagian Keuangan dan Kepegawaian dan biaya penataan gedung sementara.
- c. Mata anggaran 5330 (pemeliharaan kendaraan bermotor)
Dibutuhkan biaya rehabilitasi kendaraan operasional 2 buah kendaraan roda 4 (ambulance dan VW combi).
- d. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)
Dibutuhkan biaya penambahan langganan daya dan jasa, biaya penyekalan dan biaya pengecatan gedung kantor.

(4) Propinsi D.I. Yogyakarta

- a. Mata anggaran 5220 (inventaris kantor)
Diperlukan alat-alat inventaris kantor seperti wireless 2 buah dan enam buah handy talky.
- b. Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang)
Diperlukan pengadaan 1 buah komputer.
- c. Mata anggaran 5330 (pemeliharaan kendaraan)
Diperlukan biaya rehab 2 buah kendaraan roda 4 yang terdiri dari 1 buah CJ 7 dan 1 buah Land rover.
- d. Mata anggaran 5350 (lain-lain pemeliharaan)
Diperlukan biaya pembuatan garasi dan KandeK Kesehatan Kabupaten Kulonprogo dibutuhkan biaya perbaikan jalan lingkungan dan pembuatan garasi Kanwil.

(5) Propinsi Jawa Timur

- a. Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang)
Diperlukan biaya pengadaan 1 buah komputer untuk Sub Bagian Keuangan.
- b. Mata anggaran 5330 (pemeliharaan kendaraan)
Diperlukan biaya rehab kendaraan roda 4 sebanyak 2 buah terdiri dari 1 buah IZUSU dan 1 buah VW Combi).
- c. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)
Dibutuhkan biaya pengaspalan jalan lingkungan disekitar gedung lama sepanjang 95 m x 4 jalur x 3 m lebar.

(6) Propinsi D.I. Aceh

- Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang)
Membutuhkan biaya untuk kegiatan rakerkesda dengan UPT-UPT yang terkait dan overhead proyektor.

(7) Propinsi Sumatera Utara

- Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)
Diperlukan biaya lanjutan rehabilitasi gedung di Jalan Sena dan perbaikan instalasi listrik di Jalan Sei Batu Gringing.

(8) Propinsi Sumatera Barat.

- a. Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang)
Biaya advis planning atas pembiayaan gedung Kanwil tahun 1981 yang belum dibangun oleh Pemda.
- b. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)
Dibutuhkan dana untuk rehab Gedung Kanwil, Gudang Farmasi Kab. Tanah Data, membutuhkan biaya pembuatan pagar, Gudang farmasi Kodya, Sawahlunto penimbunan halaman, Gudang farmasi Kab. Biki tinggi penimbunan dan pengerasan jalan.

(9) Propinsi Riau

- a. Mata anggaran 5220 (inventaris kantor)
Gudang farmasi Kab. Bengkalis membutuhkan biaya pengadaan rak besi sebanyak 30 buah.
- b. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)
Bagi Kanwil diperlukan biaya rehab gedung Kanwil penambahan daya listrik dari 6,6 KVA menjadi 13,2 KVA dan pemindahan gardu daya, Kandep Kesehatan Indra Giri Hilir membutuhkan biaya rehab gedung, Kandep Kesehatan Indra Giri Hulu membutuhkan AC, Kandep Kesehatan Kab. Bengkalis membutuhkan biaya rehab gedung kantor, dan Gudang Farmasi Kab. Indragiri Hilir, Indragiri Hulu membutuhkan biaya perbaikan pagar dan pemasangan telepon.

(10) Propinsi Jambi

- a. Mata anggaran 5210 (keperluan sehari-hari perkantoran)
dibutuhkan biaya sewa gedung untuk Kandep Kesehatan Kodya Kerinci
- b. Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang)
Diperlukan biaya pengadaan AC untuk ruang rapat Kanwil, papan data Dr PTT dan speaker untuk diaula.
- c. Mata anggaran 5330 (pemeliharaan kendaraan)
Diperlukan biaya 2 buah roda 2.
- d. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)
Bagi Kanwil membutuhkan biaya pengerasan halaman kantor dengan memasang conbloc, perbaikan pagar dan rehab gedung dan Kandep Kesehatan Kodya Tanjung Jabung membutuhkan biaya pengurangan.

(11) Propinsi Sumatera Selatan

- a. Mata anggaran 5210 (keperluan sehari-hari perkantoran)
Bagi Kantor Wilayah membutuhkan satu orang satpam untuk gudang kantor Wilayah.
- b. Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang)
Bagi Kantor Wilayah membutuhkan mesin stensil dan AC split 1 PK. Kandep Kesehatan Kodya Palembang untuk kegiatan jabatan fungsional agar ditambah karena adanya Rumah Sakit Umum Palembang, Rumah Sakit Jiwa,

Rumah Sakit Kusta Kelas A yang mempunyai golongan II.

- c. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan) diperlukan biaya pemasangan telepon, PAM, dan penggantian seng ruang joglo bagi Kantor Wilayah dan Gudang Farmasi Kodya Palembang pembuatan jalan masuk.

(12) Propinsi Lampung

- a. Mata anggaran 5220 (inventaris kantor) Untuk Kanwil dibutuhkan 3 set kursi/meja untuk Kepala Sub Bagian, filling cabinet 5 buah, lemari besi 5 buah dan kipas angin 5 buah.
- b. Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang) membutuhkan biaya untuk pengadaan mesin stensil double folio 1 buah, camera, karaoke, AC, handly Talky, Komputer untuk Kabag Kepegawaian, kursi tamu dan aiphon 5 chanel.
- c. Mata anggaran 5330 (pemeliharaan kendaraan) Bagi Kanwil Depkes Propinsi Lampung membutuhkan biaya rehab untuk 2 buah kendaraan roda 4 (VW combi).
- d. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan) Bagi Kanwil membutuhkan biaya perbaikan instalasi listrik dan penambahan daya dari 10 KVA menjadi 20 KVA, rehab gedung Dharma Wanita, gudang Kanwil, dan garasi. Kandep Kesehatan dan Gudang Farmasi Kabupaten Lampung Selatan memerlukan pemasangan PAM dan Gudang Farmasi Kodya Lampung memerlukan pemasangan telepon, Kandep Kesehatan Kab. Lampung Utara membutuhkan rehab gedung kantor dan Kandep Kesehatan Kodya Lampung membutuhkan biaya rehab talang air.

(13) Propinsi Kalimantan Barat

- a. Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang) Bagi Kantor Wilayah membutuhkan biaya pengadaan overhead proyektor.
- b. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan) Bagi Kanwil membutuhkan biaya perbaikan atap gudang dan lantai diganti keramik. Bagi Kandep Kesehatan dan Gudang Farmasi pada umumnya setiap mata anggaran masih mengalami kekurangan.

(14) Propinsi Kalimantan Tengah

- a. Mata anggaran 5220 (inventaris kantor) Bagi Kanwil membutuhkan 4 buah filling cabinet, 5 buah mesin tik, meja kursi 10 stel, dan rak besi arsip 4 buah.
- b. Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang) Diperlukan biaya untuk pengadaan overhead proyektor, AC split, sound system, komputer untuk bagian kepegawaian dan papan data untuk Dr PTT.
- c. Mata anggaran 5330 (pemeliharaan kendaraan) Diperlukan biaya rehabilitasi bodi kendaraan roda empat bagi Kantor Wilayah.
- d. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan) Bagi Kantor Wilayah membutuhkan biaya rehabilitasi

lantai kantor, tempat parkir dan garasi.

Untuk Kandep Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat, Kandep Kesehatan Kab. Barito Selatan, Gudang Farmasi Barito Selatan, dan Barito Utara membutuhkan rehab gedung kantor.

(15) Propinsi Kalimantan Selatan

Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)

Bagi Kantor Wilayah membutuhkan biaya pengerasan jalan lanjutan dan perbaikan jembatan penghubung. Kandepkes Kab. Tapin perbaikan instalasi air dan telepon serta pengerasan jalan untuk Kab. Tanah Laut, perbaikan gedung untuk Kab. Tabalong.

(16) Propinsi Kalimantan Timur

Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)

Bagi Kantor Wilayah membutuhkan biaya perbaikan WC/kamar mandi, pembuatan jalan aspal dan penggantian meteran listrik.

(17) Propinsi Sulawesi Utara

a. Mata anggaran 5220 (inventaris kantor)

Dibutuhkan biaya pengadaan kursi 20 buah dan meja rapat.

b. Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang)

Bagi Kanwil membutuhkan biaya kehumasan (tiperecorder), pengadaan AC dan komputer.

c. Mata anggaran 5330 (pemeliharaan kendaraan)

Bagi Kanwil membutuhkan biaya rehab kijang. Untuk Kandep Kab. Gorontalo rehab Jeep.

d. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)

Bagi Kantor Wilayah memerlukan biaya pembuatan pagar 210 m² dan Kantor Departemen Kesehatan Kab. Sangir Talaud membutuhkan biaya rehabilitasi atap plafon dan pembuatan pagar. Gudang farmasi Kabupaten Manado dibutuhkan biaya renovasi gedung dan Kandep Kesehatan Kodya Manado membutuhkan pemasangan telepon, Kandepkes Kabupaten Bolaang Mongondou pembuatan pagar 270 m².

(18) Propinsi Sulawesi Tengah

a. Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang)

Bagi Kantor Wilayah membutuhkan biaya pengadaan wireless, overhead proyektor, meja tamu, dan AC 2 unit.

b. Mata anggaran 5330 (pemeliharaan kendaraan)

Bagi Kantor Wilayah membutuhkan biaya rehabilitasi 1 buah kendaraan roda 4 (VW Combi).

c. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)

Bagi Kantor Wilayah membutuhkan biaya perbaikan lantai dari keramik dan pagar sepanjang 110 m².

Untuk Kandep Kesehatan Kab. Poso, Gudang farmasi Kab. Banggai dan Buol Toli-Toli membutuhkan biaya rehab gedung serta Gudang Farmasi Kab. Poso perbaikan gedung dan pagar.

(19) Propinsi Sulawesi Selatan

Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)

Diperlukan biaya untuk rehab plafon gudang Kanwil.

(20) Propinsi Sulawesi Tenggara

- a. Mata anggaran 5330 (pemeliharaan kendaraan)
Diperlukan biaya untuk rehab kendaraan roda 4 (CJ 7) bagi Kantor Wilayah Depkes Sulawesi Tenggara.
- b. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)
Bagi Kantor Wilayah membutuhkan biaya perbaikan instalasi listrik, pembuatan teras dan tempat parkir. Gudang Farmasi Kab. Muna dan Kolaka membutuhkan biaya pemasangan telepon. Gudang Farmasi Kab. Muna dan Kab. Sumbawa Barat membutuhkan rehabilitasi gedung kantor.

(21) Propinsi Maluku

- a. Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang)
Bagi Kantor Wilayah membutuhkan AC, dan komputer.
- b. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)
Bagi Kantor Wilayah membutuhkan biaya rehab gudang Kanwil yang terbakar. Kandep Kesehatan Kodya Maluku pembuatan pagar keliling, Kandep Kesehatan Kab. Maluku Utara rehab instalasi listrik dan PAM, Gudang Farmasi Kab. Maluku pemasangan PAM dan pengembangan ruang gudang, Gudang Farmasi Kab. Halmahera membutuhkan pemasangan instalasi air (PAM).

(22) Propinsi Bali

- a. Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang)
Untuk Kanwil perlu disediakan dana untuk UPS.
- b. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)
Diperlukan biaya pengerasan jalan, dan perbaikan AC. Bagi Kandep Kesehatan diperlukan penambahan biaya pemeliharaan taman, mengingat tahun anggaran 1993/1994 disediakan untuk pembuatan taman.

(23) Propinsi Nusa Tenggara Barat

- a. Mata anggaran 5330 (pemeliharaan kendaraan)
Untuk Kanwil Depkes Propinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan biaya rehab kendaraan roda 4 (CJ 7).
- b. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)
Kanwil Depkes Propinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan biaya pengerasan halaman, pembuatan pembuangan air limbah. Gudang Farmasi Kabupaten Lombok Barat membutuhkan biaya pengurusan.

(24) Propinsi Nusa Tenggara Timur

- a. Mata anggaran 5250 (lain-lain belanja barang)
Kanwil Depkes Propinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan 1 buah AC 2 PK.
- m. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)
Bagi Kantor Wilayah membutuhkan biaya pemasangan paving block tempat parkir dan Gudang Farmasi Kab. Sumbawa Barat dan Kab. Alor membutuhkan biaya rehab gedung.

(25) Propinsi Irian Jaya

- a. Mata anggaran 5330 (pemeliharaan kendaraan)
Kantor Wilayah Depkes Propinsi Irian Jaya membutuhkan biaya rehab 1 buah kendaraan roda 4 (VW Combi).
- b. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)
Bagi Kantor Wilayah membutuhkan biaya pembuatan tempat parkir dan Gudang Farmasi Kab. Merauke membutuhkan biaya rehab gedung kantor.

(26) Propinsi Bengkulu

- a. Mata anggaran 5330 (pemeliharaan kendaraan)
Bagi Kantor Wilayah membutuhkan biaya rehab kendaraan roda 4 (VW Combi).
- b. Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan)
Bagi Kantor Wilayah membutuhkan biaya pengerasan jalan lingkungan dan untuk Kandep Kesehatan Kab. Rejang Lebong serta Kab. Tabalong membutuhkan biaya rehab gedung.

(27) Propinsi Timor Timur

Mata anggaran 5350 (lain-lain belanja pemeliharaan) Diperlukan biaya perbaikan jalan aspal halaman kantor, penggantian/pemasangan instalasi listrik dan perbaikan taman.

B. Permasalahan anggaran pembangunan

Tugas dan fungsi teknis di Kanwil telah ditangani dan dibina secara baik oleh Unit Teknis Bidang-Bidang, sedangkan kegiatan administratif belum dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya kelemahan dibidang administratif ini akan berakibat kurang tertibnya didalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian program.

Hambatan tersebut itu antara lain disebabkan anggaran untuk membiayai kegiatan administratif selama ini hanya bersumber dari anggaran rutin yang sangat terbatas.

Untuk menanggulangi hambatan tersebut maka kegiatan peningkatan administrasi diupayakan pembiayaannya juga dari anggaran pembangunan. Untuk dapat masuk dalam kegiatan proyek yang mendapat menunjang program kesehatan maka disusunlah rencana kegiatan tata usaha yang diharapkan menghasilkan :

1. Analisa anggaran tahunan kesehatan propinsi, per program, per DATI I dan DATI II.
2. Analisa tenaga kesehatan didalam rangka pengembangan dan pemanfaatannya.
3. Analisa perlengkapan barang-barang inventaris proyek.
4. Pembinaan teknis dan supervisi.
5. Pelatihan bagi Pimpinan dan Bendaharawan Proyek.

Untuk menampung kegiatan proyek bagi bagian tata usaha proposalnya sebelumnya telah dilakukan studi dan peninjauan oleh Biro Keuangan dan Bappenas di dua propinsi (Jawa Timur dan Sumatera Barat) antara lain menghasilkan :

- a. Untuk kegiatan peningkatan administrasi keuangan agar dimasukkan :
- Dalam proyek : Perencanaan umum kesehatan pusat
 - Bagian proyek : Perencanaan umum kesehatan propinsi
 - Tolok ukur : Peningkatan administrasi keuangan
- b. Untuk kegiatan peningkatan administrasi perlengkapan agar dimasukkan :
1. Dalam DIP terpadu dimasukkan pada :
 - Dalam Proyek : Peningkatan pelayanan kesehatan dasar
 - Bagian Proyek : Peningkatan pelayanan kesehatan dasar Propinsi.
 - Tolok ukur : - Administrasi proyek
- Pembinaan proyek pelayanan kesehatan Dasar.
 2. Diluar DIP Terpadu agar dimasukkan :
 - Proyek : Pemberantasan penyakit menular
 - Bagian proyek : Pembinaan proyek
 - Tolok ukur : Pemantauan inventarisasi perlengkapan barang-barang proyek.
 3. Untuk kegiatan pendidikan dan latihan bagi para pemimpin dan bendaharawan proyek di 14 propinsi (DIP Terpadu) dimasukkan dalam :
 - Proyek : Peningkatan pelayanan kesehatan dasar
 - Bagian proyek : Peningkatan pelayanan kesehatan dasar propinsi.
 - Tolok ukur : Pendidikan dan latihan
 4. Untuk peningkatan administrasi kepegawaian dimasukkan dalam :
 - Proyek : Sistem informasi kesehatan
 - Bagian proyek : Pengembangan informasi
 - Tolok ukur : Peningkatan administrasi kepegawaian.
 - Catatan :
DIP Terpadu terdiri dari propinsi : DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
 5. Petunjuk penyampaian DUP tahun 1994/1995
Setelah DUP disusun oleh bagian tata usaha Kanwil selanjutnya DUP agar disampaikan melalui bidang PPE/PPTK Kanwil untuk diusulkan dalam DUP Kanwil.
 6. Dalam menyusun DUP agar tetap berpedoman pada Petunjuk Penyusunan Rencana Tahunan Kesehatan, dan Pedoman Penyusunan DUP/LK Proyek Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 1994/1995 yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan.

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN TATA USAHA
KANWIL BERDASARKAN PROYEK-PROYEK TAHUN 1994/1995

(dalam ribuan rupiah)

NO.	PROPINSI	P U K	SISTEM INFORM KES	P P M	PENINGK KES DASAR	JUMLAH
1	DKI Jakarta	19.096	25.496	-	34.588	79.180
2	Jawa Barat	24.960	22.340	-	36.976	84.276
3	Jawa Tengah	18.010	22.310	-	38.570	78.890
4	D.I. Yogya	26.350	22.250	-	38.646	87.246
5	Jawa Timur	24.970	22.370	-	44.998	92.338
6	D.I. Aceh	25.300	22.700	22.920	-	70.920
7	Sum. Utara	25.300	22.700	-	52.252	100.252
8	Sum. Barat	27.876	23.668	-	42.480	94.024
9	R i a u	18.440	23.840	27.940	-	70.220
10	J a m b i	19.380	23.780	19.760	-	62.520
11	Sum.Selatan	26.476	23.876	29.920	-	80.272
12	Lampung	32.140	23.990	-	38.254	94.384
13	Kal. Barat	23.878	21.278	21.278	-	66.434
14	Kal. Tengah	29.240	25.940	27.240	-	82.420
15	Kal.Selatan	30.540	22.940	23.240	-	76.720
16	Kal. Timur	26.230	23.630	-	44.770	94.630
17	Sul. Utara	24.220	23.120	31.040	-	78.380
18	Sul. Tengah	28.884	26.284	26.284	-	81.452
19	Sul.Selatan	30.959	28.359	-	48.660	107.978
20	Sul. Tenggara	25.540	22.940	23.240	-	71.720
21	Maluku	32.640	29.540	-	61.024	123.204
22	B a l i	19.280	22.280	-	45.748	87.308
23	N T B	20.054	23.350	-	70.950	114.354
24	N T T	28.835	25.040	-	50.100	103.975
25	Irian Jaya	36.616	32.724	37.080	-	106.420
26	Bengkulu	27.560	24.960	24.960	-	77.480
27	Timor Timur	29.530	27.280	24.360	-	81.170
J u m l a h		702.304	658.985	338.862	648.016	2.348.167

C. Permasalahan Perbendaharaan

1. Tata Usaha Keuangan/Perbendaharaan

- a. Untuk menerbitkan SK Peminpin dan Bendaharawan Proyek pada umumnya sudah berjalan dengan baik kecuali bagi beberapa Bagian Proyek masih terdapat kelambatan antara lain Bagian Proyek POM, Bagian Proyek Peningkatan Latihan Pegawai, Bagian Proyek CHN 3, dan Bagian Proyek Pendidikan. Kelemahan ini di sebabkan adanya Bagian Proyek Baru yang pada waktu pengiriman usul Bagian Proyeknya belum diketahui.
- b. Dalam Pengusulan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek belum seluruhnya sesuai dengan Surat Edaran Bapak Sekretaris Jenderal yaitu yang menyatakan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil yang menjadi tanggung jawab dalam pengusulan Pimpinan dan Bendaharawan, akan tetapi masih banyak dilakukan oleh Bidang P2TK. Untuk tahun yang akan datang diharapkan seluruhnya sudah dilakukan oleh Kepala Tata Usaha Kanwil.
- c. Mengusulkan agar formulir dari URT/Satker/Proyek yang ditujukan ke Kanwil, setelah diteliti oleh Kanwil diteruskan ke Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan) dengan formulir usulan baru yang ditanda tangani oleh Kepala Kanwil yang bersangkutan.
- d. Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan keuangan diusulkan agar para bendaharawan berada dalam salah satu atap di Kanwil.
- e. Sehubungan dengan rencana DIP Terpadu di 14 Propinsi, diusulkan agar bendaharawan yang akan ditunjuk dipersiapkan terlebih dahulu melalui pelatihan secara region.
- f. Untuk meningkatkan pengawasan keuangan agar Sub Bagian Keuangan Kanwil memonitor pelaksanaan seluruh pemerikasaan Kas Intern yang dilakukan oleh Pimpinan Proyek, Atasan langsung dan pejabat yang ditunjuk.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)

a. Umum

- (1) Penerimaan jasa giro pada umumnya belum terkoordinir oleh Bendaharawan Penerima ditingkat Kanwil, maupun di UPT disebabkan belum aktifnya Bendaharawan Penerima meminta kepada Bendaharawan Proyek, Rutin dan Bendaharawan lainnya. Pada rekening koran tidak tercatat jasa giro (BDN), dan terlambatnya diterima rekening koran dari Bank.
- (2) Besaran tarif perijinan yang ada dasar hukumnya terlalu kecil, diusulkan agar segera di sesuaikan. Perijinan-perijinan yang belum ada besarnya tarifnya agar segera diproses, sehingga perijinan-perijinan dapat di pungut.
- (3) Jenis-jenis penerimaan seperti sewa rumah, penjualan kendaraan yang dihapuskan sulit dimonitor setelah pegawai yang bersangkutan pensiun.
- (4) Pungutan dari hasil perijinan, penjualan dokumen lelang agar dikoordinir oleh Bendaharawan penerima.

- a. Kesulitan yang dihadapi dalam penyelesaian kerugian negara adalah disebabkan karena, tidak lengkapnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan proses penghapusan kekurangan uang. Persyaratan tersebut antara lain : LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), Surat Keterangan Kepolisian (TKP), dan Surat Keterangan KPKN. Langkah yang telah disepakati untuk kelengkapan persyaratan ini, yaitu meminta mantuan melalui Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan.
- b. Untuk mengajukan permohonan persetujuan penghapusan antara uang dan barang harus dipisahkan, karena kewenangan dalam memberikan persetujuan penghapusan uang dan barang berbeda yaitu wewenang memberikan persetujuan penghapusan uang adalah Direktur Perbendaharaan Negara dan wewenang memberi persetujuan penghapusan barang adalah Direktur Pembinaan Kekayaan Negara.
- c. Untuk kasus kerugian negara yang terjadi berupa kehilangan barang, supaya diteruskan kepada Biro Perlengkapan.
- d. Kasus kerugian negara yang dinyatakan oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan sebagai TPTD (Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti) pada Kanwil Depkes Propinsi Sumatera Utara dinyatakan selesai

D. Permasalahan Perhitungan Anggaran

1. Perlu diadakan pelatihan tenaga verifikasi penyusunan perhitungan anggaran ditingkat Kantor Wilayah agar diperoleh tenaga-tenaga trampil.
2. Untuk keperluan sebagaimana tercantum dalam point 1 diperlukan dana pendukung.
3. Perlu ditegaskan dari pusat bahwa penyusunan perhitungan anggaran menjadi tugas Sub. Bagian Keuangan sekaligus penyusunan PNBK.

VIII. KESIMPULAN/PENUTUP

1. Alokasi dana dalam DIK 1993/1994 belum sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, hal ini disebabkan masih terbatasnya dana yang tersedia. Untuk tahun anggaran 1994/1995 prioritas utama dalam penyusunan anggaran rutin adalah :
 - a. pengadaan komputer 27 Kantor Wilayah untuk Bagian Kepegawaian mengingat besarnya volume kegiatan yang harus dikerjakan.
 - b. kegiatan penilaian angka kredit tenaga jabatan fungsional yang dilaksanakan oleh tingkat pusat, daerah tingkat I dan daerah tingkat II baru sebagian belum tertampung seluruhnya.
 - c. kegiatan penelitian khusus (litsus) hal ini sesuai dengan surat keputusan BAKN PO : 01 tahun 1991 tentang penerapan ketentuan penelitian khusus (litsus) bagi pelamar/PNS/

- Pegawai/karyawan BUMN dan Bank bank milik Negara/daerah dalam rangka penerimaan pegawai baru.
- d. pengadaan pakia dinas untuk seluruh pegawai.
 - e. biaya pemeliharaan lain-lain untuk seluruh Kader Kesehatan.

2. Dalam penyelesaian kasus kerugian negara, selama ini dirasakan masih mengalami hambatan karena belum adanya kejelasan mengenai prosedur yang harus ditempuh. Dengan dikeluarkannya SK Menteri Kesehatan tanggal 21 Juni 1991 nomor 357/Menkes/SK/VI/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Departemen Kesehatan, hendaknya Biro Keuangan memberikan pengarahannya dan penjelasan lebih lanjut agar terdapat keseragaman dalam penyelesaian kasus kerugian negara. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan negara non tax, yang selama ini belum mendapat perhatian khusus, sehingga diharapkan adanya petunjuk lebih lanjut dari Biro Keuangan tentang jenis-jenis penerimaan serta peningkatan penerimaan negara non tax.
3. Surat Edaran Ditjen Anggaran tanggal 14 Maret 1990 Nomor SE-39/A/1990 perihal petunjuk pelaksanaan sistem baru mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN, untuk anggaran rutin tidak ada permasalahan namun untuk proyek-proyek tertentu masih mengalami hambatan terutama pengiriman SPJ yang sesuai dengan ketentuan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Keterlambatan penyampaian SPJ tersebut disebabkan karena daerahnya terpencil dan transportasinya yang sulit.
4. Kantor Departemen Kesehatan dan Gudang Farmasi masih banyak yang belum memiliki gedung sendiri dan menumpang pada Kantor Dinas Kesehatan setempat. Sebagian dari satuan kerja tersebut sudah memiliki tanah yang disediakan Pemda namun biaya pembangunan gedungnya belum tersedia dalam DIP.
5. Penyelenggaraan rapat konsultasi administrasi keuangan ini adalah yang keenam kalinya dan penyelenggaraan tahun ini diselenggarakan di Ujung Pandang. Rapat konsultasi administrasi keuangan ini di susun oleh para peserta daerah agar tempatnya bergantian, dan untuk tahun 1994 akan diselenggarakan di Medan yang direncanakan akan dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Keuangan Kanwil seluruh Propinsi serta UPT-UPT di lingkungan Propinsi Sumatera Utara dan peserta dari pusat.





DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

alan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (15)

Nomor : PR.00.01.1.550

Jakarta, 11 Oktober 1993

Lampiran : 1 (satu) buku

Perihal : Hasil Rapat Konsultasi

Kepada Yth.

Administrasi Keuangan Tahun 1993

Para Kepala Kantor Wilayah

Departemen Kesehatan.

Ken

DISPERPUSIP JATIM

Bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Konsultasi Administrasi Keuangan Tahun 1993 yang diselenggarakan di Ujung Pandang pada tanggal 2 s.d. 7 Agustus 1993.

Demikianlah atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Ken

Kepala Biro Keuangan